

ABSTRAK
PERSEPSI PELAKU UMKM MENGENAI KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI
KECAMATAN WANUKAKA, KABUPATEN SUMBA BARAT

Nama : Alfred Frengki Biru
Nim : 21190111
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi

Penelitian ini berfokus pada analisis persepsi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap kewajiban perpajakan di Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat. Pajak merupakan komponen utama dalam sistem keuangan negara yang berfungsi sebagai sumber penerimaan untuk membiayai pembangunan nasional. Namun, tingkat kepatuhan pajak di sektor UMKM masih rendah, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses informasi dan literasi perpajakan seperti Kecamatan Wanukaka. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana persepsi, kesadaran, dan pengetahuan pelaku UMKM memengaruhi kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan, serta kendala dan harapan yang muncul dalam proses pelaksanaannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan, dengan fokus pada aspek kesadaran pajak, kendala kepatuhan, pemahaman prosedur perpajakan, serta pandangan mereka terhadap manfaat dan keadilan sistem pajak. Secara teoretis, penelitian ini berlandaskan pada Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*), Teori Persepsi, dan Teori Keadilan, yang menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap keadilan, manfaat, dan efektivitas sistem perpajakan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi, dan dokumentasi. Sampel penelitian terdiri dari 10 pelaku UMKM di Kecamatan Wanukaka yang dipilih secara *simple random sampling*. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji validitasnya menggunakan triangulasi sumber, metode, dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kecamatan Wanukaka memiliki kesadaran normatif bahwa membayar pajak merupakan kewajiban moral dan hukum sebagai warga negara. Namun, kesadaran tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pemahaman teknis yang memadai mengenai prosedur perpajakan. Sebagian besar responden menganggap proses administrasi pajak seperti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan penghitungan PPh Final 0,5% masih sulit dipahami. Rendahnya sosialisasi dari pihak otoritas pajak, minimnya pendampingan, serta keterbatasan akses informasi menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kewajiban pajak.

Selain itu, muncul persepsi bahwa pajak masih dianggap sebagai beban, terutama bagi pelaku usaha kecil dengan omzet yang tidak stabil. Meskipun demikian, para pelaku UMKM tetap mengakui pentingnya pajak bagi pembangunan daerah. Mereka berharap agar manfaat pajak dapat dirasakan secara langsung, misalnya melalui peningkatan infrastruktur, dukungan modal, atau program pemberdayaan usaha. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor budaya dan lingkungan sosial berpengaruh signifikan terhadap perilaku perpajakan. Nilai-nilai seperti tanggung jawab dan kejujuran menjadi pendorong positif untuk patuh pajak, sementara pandangan negatif masyarakat mengenai pajak dapat menurunkan motivasi kepatuhan.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, hasil penelitian memperkuat konsep bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum dan sanksi, tetapi juga oleh persepsi, keadilan, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Secara praktis, temuan ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan bagi UMKM melalui program edukasi, sosialisasi berbasis bahasa lokal, dan transparansi penggunaan pajak. Dengan demikian, pendekatan yang menekankan pada edukasi, pendampingan teknis, dan komunikasi dua arah diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan serta mendorong kepatuhan pajak yang berkelanjutan di kalangan pelaku UMKM di Kecamatan Wanukaka.

Kata Kunci: Persepsi Pelaku UMKM